



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUNARYO**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **196226**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.311.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/162 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/53 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 407.900.000
3. Tanah Seluas 444 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
4. Tanah Seluas 742 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 81000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
6. Tanah Seluas 16500 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
9. Tanah Seluas 66000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
10. Tanah Seluas 11500 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
11. Tanah Seluas 90000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
12. Tanah Seluas 35000 m2 di TEBO, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
13. Tanah Seluas 1090 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 328.600.000**

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



2. MOBIL, HONDA HR-V MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
240.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
18.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 179.848.818

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.881.548.818

III. HUTANG Rp. 331.302.437

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.550.246.381

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.